

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Suyanto, Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan, Gresik, Unigres Press, 2022, H. 78
- Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif (Riau Publishing, 2024)
- Yopy Perdana Kusuma, Komunikasi Massa dan Media Baru (Pustaka Larasan, 2022)
- Sukardi, Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia (Rajagrafindo, 2020)
- Budiyanto, Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia (Google Books, 2025)
- Imam Makhali, Hukum Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media (CV. Karya Putra Darwati, 2022)
- Nanda Nugraha, Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Bandung: Penerbit Widina, Juni, 2024)
- Hafrida, Dan Usman, Keadilan Restoratif Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana (Google Books, 2024)
- Siswanto Sunarso, Vitikmologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Sinar Grafika, Jakarta timur 2022)
- Thomas Tokan Pureklolon, Media dan Ruang Publik Digital dalam Komunikasi Politik (Halaman Moeka Publishing, 2025).
-, Hukum Pidana Siber: Aspek Teoretis dan Praktis dalam Era Digital di Indonesia (Repository Penerbit Eureka, 2024)
-, Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023) (Google Books, 2023)
-, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penerbit, 2024)
-, Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28F dan 28J UUD 1945 (Penerbit, 2023)
-, Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan (Penerbit, 2023)
- Maidina Rahmawati, et.al., Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jakarta: Institut for Criminal Justice Reform, 2022)

Jurnal Hukum

- Badia Amin, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Prinsip Restorative Justice," *Jurnal Hukum (Legalitas)* (2025): 1-15.
- Dyah Ayu Ramadhanti, et al., "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Justicia Sains* (2023): 112-125.
- Emaliawati, "Defamation in the Digital Age: An Analysis of the Application of Restorative Justice under Indonesian Criminal Law," *Intellectual Law Review (ILRE)* 2, no. 1 (2024): 45-60,
- Edgar Irvin Raranta, "A Systematic Literature Review: Restorative Justice Approaches Resolving Violations of Electronic Information and Transaction Laws in Indonesia," *Syntax Admiration* 5, no. 7 (2024): 120-135.
- H. Hartanto, "Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura* (2020): 45-58, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jhkm/article/view/> (diakses 6 Januari 2025).
- Hartanto, et al., "Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Digital," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (2022): 95-114,
- H. Hartanto, "Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura* (2020): 45-58,
- Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi, "Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium," *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 12-25.
- Retno Hariati dan Abdul Kholiq, "The Urgency of Restorative Justice Principles in Law Enforcement Efforts against Defamation Crimes through Social Media Twitter in Indonesia," *Jurnal Law and Policy Horizon* 4, no. 4 (2024): 88-102.
- Widodo, "Restorative Justice in Criminal Defamation on Social Media: A Legal Perspective and Implementation in Indonesia," *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024): 189-203.
- Y. Nuraeni, "Restorative Justice as a Solution to the Press Crisis," *Journals USM* (2025): 1-12.
- Yoanda Widi Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan

Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, September 2025

Media Daring

Ardi Putra Maha, "Catatan tentang Problem Penerapan Delik Defamation dalam UU ITE," Hukumonline, 9 April 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt625295c004e2b/catatan-tentang-problem-penerapan-delik-defamation-dalam-uu-ite/> (diakses 7 Januari 2025).

Erizka Permatasari, S.H. "Penanganan Pencemaran Nama Baik di Medsos Harus Mengedepankan Restorative Justice," Hukumonline, 1 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanganan-pencemaran-nama-baik-di-medsos-harus-mengedepankan-restorative-justice-i-cl6666/> (diakses 7 Januari 2025). Mona Ervita, "Niat Revisi Berujung Interpretasi," Hukumonline, 3 Maret 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/niat-revisi-berujung-interpretasi-lt60404bf111e41> (diakses 7 Januari 2025).

Skripsi

Echa valeta,” Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang - Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau ”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022.

Majalah

Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI, No. 247 (Juni 2006), IKAHI, Jakarta.

Majalah Hukum Nasional, Nomor 01 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 2011.

Makalah-makalah

Brigjen Pol. Heru Dwi Pratondo, "Implementasi Restorative Justice: Kendala dan Solusi," Makalah pada Seminar Implementasi Restorative Justice di Indonesia: Kendala dan Solusi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, Zoom dan YouTube FH UNRAM, Mataram, 5 Februari 2022.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 54 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 21.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 dan Pasal 7A.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.